

# 2022 - Analisis E-Leadership (JATISI)

*by* Yudha Herlambang

---

**Submission date:** 05-Jul-2022 10:49AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1866767496

**File name:** 20.\_Yudha\_Herlambang\_JATISI\_-\_artikel.pdf (341.92K)

**Word count:** 6143

**Character count:** 41728

## Analisis *E-Leadership* Pada *E-Government* Pemerintah Daerah Demi Menyukseskan Transformasi *New Normal* Di Era Pandemi Covid-19

Yudha Herlambang Cahya Pratama<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jl. Wonorejo Utara 16 Rungkut, Surabaya, Indonesia

<sup>3</sup>Jurusan Sistem Informasi, FTD UHW Perbanas, Surabaya

e-mail: <sup>1</sup>yudha.herlambang@perbanas.ac.id

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis *e-leadership* pada *e-government* Pemda Indonesia dalam upaya menyukseskan transformasi menuju *new normal*. Penelitian dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan data penelitian berupa data sekunder. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yang terdiri dari empat tahapan, yaitu telaah data, reduksi data, kategorisasi data, dan penafsiran data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-government* di Pemda masih belum dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Hal ini dapat diketahui dari belum adanya keterpaduan penerapan *e-government* antar lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Keadaan demikian juga menggambarkan *e-leadership* di Pemda yang juga masih belum optimal. Metode untuk mengoptimalkan *e-leadership* pada *e-government* Pemda terdiri dari: 1) Meningkatkan pengetahuan *e-leader* mengenai TI yang digunakan di Pemda; 2) Menciptakan budaya kerja yang kondusif terhadap penerapan *e-government*; 3) Melaksanakan promosi literasi SPBE; 4) Pengembangan jabatan fungsional PNS; 5) Pelaksanaan kemitraan dengan pihak non pemerintah untuk meningkatkan kompetensi teknis ASN terkait *e-government*; 6) Menggunakan pendekatan EMAC untuk memilih kandidat *e-leader*; dan 7) Meningkatkan kapabilitas *e-leadership* pada berbagai domain pengambilan keputusan. Optimalisasi *e-leadership* pada *e-government* di Pemda tersebut diharapkan dapat menyukseskan transformasi menuju era *new normal* melalui penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai konsep *new normal* dan terkait pentingnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

**Kata kunci**— *E-Government*, *E-Leadership*, Pemerintah Daerah, *New Normal*, Covid-19

### Abstract

The purpose of this study is to analyze *e-leadership* in the implementation of *e-government* by Indonesian regional government as an effort to succeed the transformation to the new normal. The research was carried out using qualitative approach with research data in the form of secondary data. The Data were then analyzed using qualitative analysis techniques consisting of four stages, namely data review, data reduction, data categorization, and data interpretation. The results of the study indicate that the *e-government* in regional governments still not implemented effectively and efficiently. This can be seen from the lack of integration in the application of *e-government* between government agencies, both at the central and regional levels. This situation also illustrates that *e-leadership* in the local government is still not optimal. Methods for optimizing *e-leadership* in *e-government* consist of: 1) Increasing *e-leader* knowledge of IT used in regional governments; 2) Creating a work culture that is conducive to the implementation of *e-government*; 3) Implement SPBE literacy promotion; 4) Development of

*PNS functional positions; 5) Implementation of partnerships with non-government parties to improve the technical competence of ASN related to e-government; 6) Using the EMAC approach to select e-leader candidates; and 7) Improving e-leadership capability in various decision-making domains. The optimization of e-leadership in the implementation of e-government by the regional government is expected to succeed the transformation into the new normal era through the dissemination of information to the public about the new normal concept and the importance of compliance with health protocols.*

**Keywords**— *E-Government, E-Leadership, Regional Government, New Normal, Covid-19*

## 1. PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang berlangsung selama hampir dua tahun sejak Maret 2020 lalu mulai menunjukkan indikasi semakin mereda. Hal ini dapat dilihat dari penurunan dalam penambahan jumlah kasus positif dan kematian akibat virus tersebut. Menurut data yang diunggah oleh pemerintah Indonesia dalam situs resmi informasi covid-19, dapat diketahui adanya lonjakan penambahan kasus positif dan kematian pada Juli 2021, yang selanjutnya menurun secara signifikan pada bulan-bulan setelahnya. Dapat diketahui bahwa penambahan jumlah kasus positif pada Juli 2021 mencapai puncaknya sebanyak 41.168 kasus baru dan jumlah kematian sebanyak 39.372 kematian. Jumlah tersebut selanjutnya menurun secara terus menerus hingga menjadi 612 kasus baru dan 868 kematian pada awal November 2021. Berdasarkan data tersebut, maka meskipun belum dapat dikatakan sepenuhnya hilang ancamannya, namun secara perlahan pandemi covid-19 mulai mereda di Indonesia [1].

Tabel 1. Trend Penambahan Jumlah Kasus Positif dan Kematian Akibat Covid-19 2021

Bulan	Kasus Positif	Perubahan	Kematian	Perubahan
Januari	12.001	-	10.719	-
Februari	5.560	-6.441	6.649	-4.070
Maret	4.682	-878	5.877	-772
April	5.833	1.151	5.202	-675
Mei	6.115	282	4.024	-1.178
Juni	21.807	15.692	10.807	6.783
Juli	41.168	19.361	39.372	28.565
Agustus	5.436	-35.732	19.398	-19.974
September	1.690	-3.746	2.848	-16.550
Oktober	620	-1.070	497	-2.351
November	612	-8	868	371

Mulai menurunnya jumlah kasus baru dan jumlah kematian memang memberikan nafas lega bagi seluruh pihak. Pemerintah dalam hal ini juga mulai melaksanakan PPKM level 1 di beberapa daerah yang disinyalir dapat dijadikan daerah percontohan PPKM level 1. Harapannya, jika daerah tersebut pada akhir pelaksanaan PPKM level 1 tidak menunjukkan peningkatan dalam hal jumlah kasus baru maupun kematian akibat covid-19, maka pemerintah juga akan melaksanakan PPKM level 1 di daerah lainnya yang memiliki kesamaan karakteristik wilayah maupun progres vaksinasi pada masyarakatnya [2]. Pelaksanaan PPKM level 1 tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kesiapan masyarakat dan pemerintah dalam memasuki masa baru paska pandemi covid-19, yang disebut dengan istilah *new normal*.

Sesuai dengan penjelasan yang dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, maka makna dari masa *new normal* adalah situasi hidup baru yang di dalamnya terdapat penerapan protokol kesehatan secara intens oleh masyarakat sebagai bentuk kesadaran tinggi atas bahaya dari virus tersebut, serta pemahaman mendalam mengenai cara menyikapinya dengan bijak demi menghindari semakin banyaknya jatuh korban. Bagi masyarakat luas, masa *new normal* menjadi permulaan hidup yang lebih menjanjikan karena kembalinya kebebasan untuk beraktivitas seperti sebelum covid, tentu dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Adapun bagi pemerintah, utamanya Pemerintah Daerah (Pemda), maka transformasi menuju masa *new normal* memberikan banyak tantangan yang harus dapat diatasi secara menyeluruh demi mendukung keberhasilan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam perubahan ke arah tatanan hidup baru tersebut [3].

Pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan seluruh lapisan masyarakat yang menjadi bagian dari wilayah pemerintahannya. Hal ini memungkinkan Pemda untuk menjadi perumus dan pelaksana kebijakan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, termasuk dalam rangka menyukseskan transformasi menuju *new normal*. Selain itu, peran Pemda juga didasari oleh adanya sistem otonomi daerah yang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Pemda untuk menangani berbagai permasalahan pada tingkat daerah [4].

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI), maka berbagai kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemda, termasuk dalam konteks transformasi menuju *new normal*, juga perlu didukung oleh pemberdayaan produk TI agar efektivitas dan efisiensi prosesnya dapat tercapai, yang pada akhirnya mampu memperbesar kemungkinan keberhasilan pencapaian tujuan dari berbagai kegiatan tersebut. Selain sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi, integrasi TI ke dalam pemerintahan juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Konsep pemerintahan tersebut dikenal dengan istilah *electronic government (e-government)* [5].

Secara sederhana, *e-government* dapat dipahami sebagai penggunaan TI, khususnya internet, dalam pelaksanaan pelayanan publik dan penyampaian informasi kepada masyarakat luas, entitas bisnis maupun lembaga pemerintahan lainnya. Penerapan *e-government* memberikan banyak manfaat bagi pemerintah, antara lain berupa peningkatan akuntabilitas, pengurangan biaya administrasi, penurunan waktu pelaksanaan pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan beragam manfaat lainnya [6].

Pelaksanaan *e-government* dapat mencapai keberhasilan jika didukung oleh beragam faktor, yang salah satunya adalah faktor *electronic leadership (e-leadership)* [7]. Pada dasarnya *e-leadership* merupakan praktik kepemimpinan, yang sebagaimana *e-government*, juga mengedepankan pemberdayaan TI dalam beragam prosesnya. *E-leadership* dapat dipahami sesuai dengan konsep kepemimpinan pada umumnya, yaitu sebuah proses pengaruh sosial yang dilaksanakan dengan bantuan TI untuk menciptakan perubahan pada pemikiran, sikap, perilaku dari pihak-pihak yang menjadi bagian dari suatu organisasi. Adapun hasil akhir yang diharapkan dicapai dari *e-leadership* adalah tercapainya tujuan dari organisasi berdasarkan peran pemimpin yang mampu secara efektif dan efisien mendayagunakan sumber daya TI [8].

Kajian ilmiah yang mengangkat topik *e-government* di Indonesia telah cukup banyak dilakukan, misalnya oleh Huda & Yunas yang berfokus pada perkembangan *e-government* di Indonesia [5]; Anugrah yang meneliti penerapan *e-government* dan keterkaitannya dengan *electronic record keeping* [9]; Prihanto yang melakukan studi komparasi penerapan *e-government* di Indonesia dan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lainnya [10]; dan Suhardi et.al. yang mengkaji mengenai korelasi antara *e-government* dan *good governance* yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia [11]. Keseluruhan penelitian tersebut

hanya berfokus pada e-government di Indonesia tanpa mengkaji keterkaitannya dengan faktor *e-leadership*, yang secara konseptual, yaitu dengan mengacu pada konsep kepemimpinan secara umum, sebenarnya memiliki keterkaitan erat dengan keberhasilan pelaksanaan e-government yang merupakan aspek pembentuk dari kinerja organisasi publik [12],[13],[14]. Penelitian yang secara umum mengkaji *e-leadership* dalam konteks *e-government* dilakukan oleh Sintiya et.al., namun berupa studi literatur tanpa menggunakan lingkup lokasi penelitian yang secara spesifik [7]. Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis *e-leadership* pada *e-government* Pemda di Indonesia dalam upaya menyukseskan transformasi menuju *new normal*. Penelitian ini penting untuk dilaksanakan karena selain dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan Pemda terkait penerapan *e-leadership* dalam upaya memfasilitasi perubahan hidup masyarakat menuju *new normal*, juga untuk mengisi kekosongan penelitian yang menganalisis mengenai *e-leadership* pada *e-government* dalam situasi pandemi covid-19.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kualitatif, yang dimaknai sebagai penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi masalah sosial untuk memperoleh pemahaman secara mendalam. Penelitian kualitatif dilaksanakan melalui sebuah proses yang meliputi analisis terhadap data-data berupa uraian bahasa atau kalimat secara induktif, yang kemudian ditafsirkan maknanya menurut pemahaman peneliti [17]. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang valid [18]. Data tersebut berupa informasi yang menjelaskan mengenai *e-leadership* dan *e-government* pada Pemda di Indonesia. Data penelitian dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan menelusuri berbagai dokumen yang memuat informasi yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini. Dokumen tersebut dapat berupa buku, jurnal, pemberitaan, maupun berbagai jenis dokumen lainnya.

Data penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang terdiri dari empat tahapan sebagai berikut [19]:

1. Menelaah keseluruhan data yang didapat dari hasil dokumentasi yang dimuat dalam dokumen resmi, foto, gambar, dan sebagainya.
2. Reduksi data, yaitu mengeliminasi berbagai data yang dianggap kurang relevan dengan tema penelitian.
3. Kategorisasi data, yaitu menyusun data berdasarkan definisi konseptual.
4. Penafsiran data, yaitu menarik pemahaman mengenai keterhubungan atas data yang telah terkategori dengan permasalahan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan E-Government oleh Pemerintah Daerah

Penerapan *e-government* di berbagai instansi pemerintah, termasuk juga di pemerintah daerah, telah diamanahkan oleh pemerintah sejak tahun 2003 yang ditandai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* (selanjutnya disebut Inpres 3/2003). Dijelaskan di dalamnya bahwa penerapan *e-government* di Indonesia didasarkan pada adanya tuntutan perubahan yang dijabarkan dalam dua poin pokok sebagai berikut:

1. Indonesia tengah menghadapi beragam perubahan yang membawa iklim ketidakpastian, sehingga perlu dilakukan peningkatan terhadap komunikasi antar lembaga negara serta partisipasi masyarakat untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. Dalam hal ini, pemerintah juga perlu meningkatkan responnya untuk secara positif menerima berbagai saran dan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
2. Masyarakat internasional sedang berada pada fase perubahan ke masyarakat informasi. Hal ini mengharuskan Indonesia untuk beradaptasi ikut serta berupaya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi agar Indonesia tidak terisolasi akibat ketertinggalannya dari masyarakat internasional. Berdasarkan hal tersebut, maka penataan negara harus didasarkan pada orientasi untuk mengarahkan masyarakat agar ikut juga menjadi masyarakat informasi.

Berdasarkan dua pokok perubahan tersebut, maka pemerintah diharapkan untuk dapat memenuhi dua modalitas tuntutan masyarakat, yaitu yang terkait dengan ketersediaan sarana prasarana publik dan kesediaan untuk membangun saluran komunikasi yang dapat digunakan untuk menjembatani penyampaian aspirasi dan partisipasi masyarakat luas dalam proses penetapan kebijakan publik. Dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat tersebut, maka setidaknya pemerintah harus melakukan empat jenis pengembangan, antara lain dalam hal fleksibilitas sistem, modernisasi sistem, peluang usaha, dan optimalisasi teknologi informasi.

Pengembangan jenis pertama, yaitu terkait dengan fleksibilitas sistem, ditujukan untuk dapat memastikan bahwa seluruh jenis interaksi yang mungkin terjadi, baik pada skala antar negara, antara negara dengan rakyat atau masyarakatnya, antara negara dengan lembaga yang berasal dari domestik maupun internasional, dan antara negara dengan masyarakat dunia. Pada pengembangan jenis kedua, pemerintah juga perlu memastikan adanya sistem manajemen yang mampu memfasilitasi interaksi dan komunikasi secara lebih efisien dan efektif, sehingga mendorong semakin cepatnya proses pengambilan keputusan. Pengembangan selanjutnya adalah dalam bentuk perluasan peluang usaha, yaitu dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi interaksi antar pelaku usaha agar dapat berkontribusi secara lebih signifikan terhadap perekonomian nasional. Terakhir, pengembangan juga perlu dilakukan pada penggunaan teknologi informasi agar penyediaan layanan publik dapat semakin cepat dan berkualitas.

Berbagai pengembangan tersebut dapat direalisasikan pemerintah dengan cara menerapkan *e-government*, yaitu dengan secara optimal memberdayakan teknologi berbasis elektronik untuk menyediakan informasi dan layanan yang dibutuhkan publik. Optimalisasi tersebut utamanya diterapkan dalam dua kegiatan utama pemerintahan, yaitu terkait manajemen informasi berbasis elektronik dan penyediaan informasi yang lebih cepat dan mudah diakses oleh publik. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat empat tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan *e-government*, yaitu:

1. Membangun jaringan informasi yang luas untuk mendukung penyediaan pelayanan publik dengan kualitas yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan jaringan informasi yang semakin luas, maka masyarakat yang berada di wilayah pelosok juga dapat mengakses berbagai informasi publik dengan mudah dan cepat. Hal tersebut menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik untuk dapat memenuhi kepentingan masyarakat tanpa terkendala oleh faktor waktu, tempat, maupun biaya.
2. Membangun konektivitas yang dapat memfasilitasi interaksi secara timbal balik antara pemerintah dengan pelaku usaha. Hal ini ditujukan untuk mendorong semakin besarnya output aktivitas ekonomi, sehingga dapat semakin memajukan perekonomian nasional.
3. Membangun prosedur dan media yang menjembatani komunikasi intens antar lembaga negara dan antara lembaga negara dengan masyarakat luas.
4. Meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaksanaan seluruh aktivitas pemerintahan, serta mendorong semakin efisiennya sinergi antar lembaga pemerintah di berbagai tingkatan.

Pengembangan *e-government* mempertimbangkan kesiapan pemanfaatan teknologi informasi yang dimiliki Indonesia, yang dalam hal ini ditinjau dari lima aspek sebagai berikut:

1. *E-leadership*, yaitu terkait dengan inisiatif dan kemampuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Infrastruktur jaringan informasi, yaitu terkait dengan kualitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan *e-government*.
3. Pengelolaan informasi, yaitu terkait dengan kemampuan untuk mengumpulkan dan mendayagunakan berbagai jenis informasi yang ada.
4. Lingkungan bisnis, yaitu terkait dengan karakteristik dunia usaha, mulai dari sistem bisnis yang diterapkan, persaingan pasar yang ada, serta berbagai kebijakan yang memayungi keseluruhan hal tersebut.
5. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, yaitu terkait dengan kesiapan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi.

Dalam prosesnya, terdapat beberapa kelemahan dari *e-government* yang telah dikembangkan, antara lain:

1. Pelaksanaan berbagai aktivitas pemerintahan belum sepenuhnya terkomputerisasi karena belum siapnya kebijakan, prosedur, dan SDM yang dibutuhkan.
2. Pengembangan *e-government* pada setiap instansi belum dapat direalisasikan karena adanya keterbatasan pada sisi anggaran.
3. Belum optimalnya sinergi antar instansi pemerintah dalam penyelenggaraan *e-government*, sehingga capaian-capaian yang diperoleh masih belum terintegrasi.
4. Penyelenggaraan *e-government* yang belum terintegrasi antar instansi pemerintah menyebabkan masyarakat belum dapat terfasilitasi kebutuhannya untuk mampu mendayagunakan teknologi berbasis elektronik dan jaringan dalam mengakses berbagai jenis pelayanan publik.

Berdasarkan kebutuhan untuk terus mengembangkan *e-government* dan berbagai kelemahan yang ditemukan, maka pemerintah merumuskan enam strategi untuk mencapai tujuan *e-government*, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan keandalan dari pelayanan publik yang dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Mendorong semakin efektif dan efisien manajemen pada berbagai instansi pemerintah di seluruh tingkatan.
3. Mengoptimalkan integrasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan
4. Mendorong peningkatan partisipasi seluruh pihak yang menjadi bagian dari pelaku usaha untuk berkontribusi secara aktif bagi pengembangan teknologi informasi beserta pemanfaatannya.
5. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM yang menjadi pelaksana kegiatan pemerintahan, baik pada tingkat pusat maupun daerah, serta masyarakat yang menjadi pengguna layanan publik.
6. Mewujudkan aktivitas pengembangan dalam proses yang direncanakan secara sistematis berdasarkan target-target capaian yang jelas dan realistis.

Pelaksanaan dari berbagai strategi pemerintah dalam rangka pengembangan *e-government* dituangkan dalam delapan langkah yang melibatkan peran aktif dari instansi terkait. Langkah-langkah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menginstruksikan kepada seluruh lembaga pemerintah untuk merumuskan renstra *e-government* untuk diterapkan di wilayah masing-masing.
2. Menetapkan bahwa rumusan *e-government* sebagaimana disebutkan di atas untuk mengikuti desain yang dirancang pemerintah.
3. Menunjuk Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai koordinator dalam proses pengembangan *e-government*
4. Menunjuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai fasilitator dalam proses pengembangan sistem manajemen dan operasional kegiatan pemerintahan di seluruh tingkatan.
5. Menetapkan Kementerian Perhubungan sebagai penanggung jawab dalam peningkatan keterlibatan dunia usaha untuk mendukung pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.
6. Menetapkan Kementerian Riset dan Teknologi sebagai koordinator dalam sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga riset dalam proses pengembangan teknologi yang dibutuhkan bagi penerapan *e-government*.
7. Menetapkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan untuk melakukan kajian komprehensif terhadap aspek kelayakan pembiayaan renstra *e-government*.
8. Menetapkan Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator dalam kerjasama yang diselenggarakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pelaksanaan keseluruhan tahapan di atas mengacu pada beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip kerjasama yang harmonis, bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penyelenggaraan *e-government* harus dapat melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing dengan mengedepankan kepentingan bersama dan kepentingan masyarakat luas.
2. Prinsip koordinasi yang intensif, bahwa setiap proses yang menjadi bagian dari pengembangan dan penyelenggaraan *e-government* harus dikoordinasikan secara berkelanjutan menggunakan jaringan yang andal.
3. Prinsip partisipasi aktif, bahwa seluruh pihak yang berkepentingan harus aktif terlibat dalam perumusan dan penerapan kebijakan terkait *e-government*.
4. Prinsip keterlibatan dunia usaha, bahwa seluruh pihak yang menjadi pelaku usaha didorong untuk terlibat aktif dalam pengembangan *e-government*.

Berdasarkan keseluruhan pemaparan di atas, maka pemerintah pada dasarnya telah merumuskan kerangka penerapan *e-government*. Namun demikian, praktik pelaksanaannya oleh berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, cenderung masih belum optimal. Hal ini setidaknya dapat diketahui dari kurangnya ketersediaan data yang menjelaskan mengenai penerapan *e-government* di Indonesia saat ini. Jika mengacu pada penilaian yang dilakukan pihak eksternal, yaitu dalam hal ini penilaian oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka memang indeks pengembangan *e-government* Indonesia (*E-Government Development Index - EGDI*) mengalami peningkatan, yaitu dari peringkat 101 pada tahun 2018 meningkat menjadi peringkat 88 pada tahun 2020 [20]. Namun demikian, penerapan *e-government* di Indonesia sebenarnya sulit untuk ditelusuri secara jelas. Hal ini disebabkan karena adanya beragam istilah yang digunakan pemerintah untuk mengganti istilah *e-government*, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), *Integrated Government (i-government)*, dan *Smart Government* [21].

Selain itu, data mengenai pemeringkatan *e-government* di instansi pemerintah sendiri juga tidak lagi diunggah di website resmi pemerintah sejak tahun 2017. Pemeringkatan *e-government* Indonesia (PeGI) adalah sebuah aktivitas yang sejak tahun 2007 secara rutin



diselenggarakan oleh Kemkominfo untuk mendorong semakin efektif dan efisiennya aplikasi teknologi informasi dan komunikasi di setiap instansi pemerintahan. Terdapat lima dimensi yang dijadikan standar pengukuran PeGI, yaitu dimensi perencanaan, aplikasi, infrastruktur, kelembagaan, dan kebijakan. Atribut dari lima dimensi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini [22]:

Tabel 2. Dimensi dan Atribut PeGI

No	Dimensi	Atribut
1	Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen/proses kebijakan TIK</li> <li>- Visi dan Misi TIK</li> <li>- Strategi penerapan kebijakan</li> <li>- Pedoman</li> <li>- Peraturan</li> <li>- Keputusan instansi</li> <li>- Skala prioritas TIK</li> <li>- Evaluasi/manajemen risiko TIK</li> </ul>
2	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberadaan organisasi</li> <li>- Tupoksi</li> <li>- SOP</li> <li>- SDM</li> <li>- Pengembangan SDM</li> </ul>
3	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data center</li> <li>- Jaringan data</li> <li>- Keamanan</li> <li>- Fasilitas pendukung infrastruktur TIK</li> <li>- Disaster recovery center</li> <li>- Pemeliharaan TIK</li> <li>- Inventaris peralatan TIK</li> </ul>
4	Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Situs wajib</li> <li>- Aplikasi fungsional utama bidang pelayanan</li> <li>- Aplikasi fungsional utama bidang administrasi dan manajemen</li> <li>- Aplikasi fungsional utama bidang legislasi</li> <li>- Aplikasi fungsional utama bidang pembangunan</li> <li>- Aplikasi fungsional utama bidang keuangan</li> <li>- Aplikasi fungsional utama bidang kepegawaian</li> <li>- Manual petunjuk aplikasi TIK</li> <li>- Inventaris aplikasi TIK</li> <li>- Interoperabilitas</li> </ul>
5	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengorganisasian/ fungsi</li> <li>- Sistem perencanaan</li> <li>- Dokumentasi masterplan</li> <li>- Implementasi masterplan</li> <li>- Anggaran/ pembiayaan</li> </ul>

Kelima dimensi PeGI di atas dianalisis oleh seorang peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2017 dan dibuktikan kelayakan serta relevansinya untuk digunakan dalam penilaian terhadap penerapan *e-government* di Indonesia. Namun demikian, seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (selanjutnya disebut PP 95/2018), maka baik istilah *e-government* maupun PeGI tidak lagi mengemuka. Hal ini di satu sisi mungkin merupakan konsekuensi dari pengembangan analisis mengenai kerangka kerja integrasi teknologi ke dalam sistem pemerintahan. Namun di sisi lain, keberlanjutan konsep PeGI sendiri sepertinya masih belum mampu difasilitasi oleh penerapan SPBE. Akibatnya, pengukuran mengenai penerapan teknologi dalam sistem pemerintahan sulit untuk dilacak, atau setidaknya, sulit untuk diketahui jejak digitalnya. Selain itu, penggunaan istilah *e-government* pada tingkat internasional, seperti EGDI oleh PBB, juga semakin memperumit analisis mengenai penerapan teknologi pada sistem pemerintahan di Indonesia karena di Indonesia tidak lagi menggunakan istilah tersebut. Ibaratnya, penerapan *e-government* yang diinisiasi Inpres 3/2003 harus diulang kembali dari awal dalam bentuk penerapan SPBE, meskipun konsep dasarnya adalah sama. Akibat lainnya adalah Indonesia kembali dihadapkan pada kondisi dini integrasi teknologi komunikasi dan informasi dalam sistem pemerintahan, yang utamanya terlihat pada belum munculnya keterpaduan antar lembaga pemerintahan pada berbagai tingkatan [23].

#### B. Optimalisasi *E-Leadership* pada *E-Government* Pemerintah Daerah demi Menyukseskan Transformasi *New Normal*

Istilah *e-leadership* digunakan dalam Inpres 3/2003 sebagai salah satu aspek yang menjelaskan mengenai pemanfaatan teknologi informasi. Disebutkan di dalamnya, bahwa *e-leadership* berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Secara konseptual, *e-leadership* dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kepemimpinan yang mengedepankan pemanfaatan TI dalam komunikasi antara pemimpin dan pengikutnya, serta pada proses pengumpulan dan penyebaran informasi [15]. *E-leadership* adalah sebuah paradigma kepemimpinan gaya baru yang menuntut pemimpin untuk mendayagunakan beragam jenis produk TI untuk mencapai tujuan-tujuan kepemimpinan, serta memimpin tim yang bekerjasama pada platform virtual [16]. Berdasarkan hal tersebut, maka *e-leadership* memiliki pengaruh besar terhadap kinerja organisasi, utamanya pada aspek penerapan *e-government* [12]–[14]. Hal ini menjadi dasar justifikasi bahwa semakin baik *e-leadership*, maka *e-government* juga dapat dilaksanakan dengan baik hingga mencapai beragam tujuannya. Sebaliknya, jika pemimpin tidak memiliki *e-leadership* yang baik, maka pelaksanaan *e-government* juga akan sulit mencapai tujuannya. Dapat juga dinyatakan bahwa peningkatan pada *e-leadership* akan mendorong terjadinya peningkatan pada capaian dari *e-government*. Sebaliknya, jika terdapat indikasi penurunan pada capaian *e-government*, maka perlu dipertanyakan mengenai kapasitas pemimpin dengan *e-leadership*nya, faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya, serta bagaimana cara yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan *e-leadership* agar dapat mendorong penerapan *e-government* secara lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya.

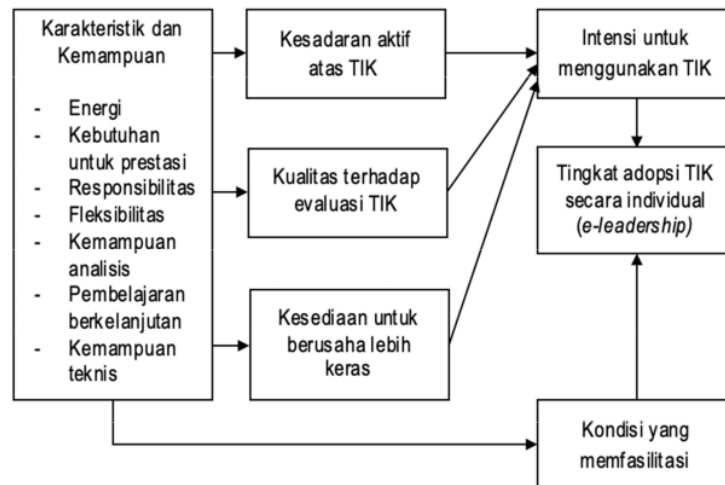
Sebagaimana penggunaan istilah *e-government* yang mulai dihilangkan karena terdapat istilah baru, yaitu SPBE yang ditetapkan dengan dikeluarkannya PP 95/2018, penggunaan istilah *e-leadership* juga diganti dengan istilah Kepemimpinan SPBE. Jika dalam Inpres 3/2003 hanya terdapat sedikit penjelasan mengenai *e-leadership*, yaitu sebagai salah satu aspek pemanfaatan teknologi informasi, maka dalam PP 96/2018 terdapat penjelasan yang cukup lengkap mengenai kepemimpinan SPBE. Pada bagian lampiran mengenai Rencana Induk Sistem SPBE Nasional disebutkan mengenai karakteristik dari Kepemimpinan SPBE, yaitu:

1. Kolaboratif, bahwa kepemimpinan SPBE harus mampu mendorong terciptanya kerjasama dan sinergi yang harmonis antar instansi pemerintah, yang memungkinkan terjadinya pemanfaatan sumber daya yang bijaksana demi kepentingan bersama.
2. Inovatif, bahwa kepemimpinan SPBE harus menjadikan peningkatan perolehan manfaat serta perbaikan efektivitas dan efisiensi proses sebagai prioritas utama.

Kepemimpinan SPBE merupakan komponen penting dalam lembaga pemerintah yang pelaksanaannya diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam membangun budaya dan lingkungan kerja yang kondusif bagi perkembangan SPBE. Oleh karena itu, maka kepemimpinan SPBE terus diupayakan untuk ditingkatkan melalui lima metode sebagai berikut:

1. Mendorong semakin tingginya pengetahuan pimpinan di lembaga pemerintahan mengenai SPBE sekaligus memberikan kesempatan yang lebih besar untuk penerapannya.
2. Menciptakan budaya kerja yang memuat nilai-nilai tertentu yang relevan dan mengarah pada SPBE.
3. Melaksanakan promosi literasi SPBE, yaitu dengan menyampaikan berbagai pengetahuan dan informasi yang memiliki keterkaitan dengan SPBE kepada seluruh pihak berkepentingan, mulai dari pemimpin lembaga pemerintahan, pegawai ASN, pengguna SPBE, pebisnis, hingga masyarakat luas. Aktivitas promosi literasi SPBE meliputi forum SPBE, pelatihan, sosialisasi, e-learning, diskusi terbuka tentang SPBE, dan berbagai aktivitas lainnya.
4. Pengembangan jabatan fungsional PNS
5. Pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak yang berasal dari non pemerintah untuk meningkatkan kompetensi teknis ASN serta untuk pembangunan dan pengembangan SPBE.

Selain menggunakan metode-metode di atas, *e-leadership* juga dapat ditingkatkan menggunakan beberapa cara yang dikonsepsikan oleh para pakar, salah satunya menggunakan pendekatan *E-Leadership Communication Adoption Model* (EMAC) yang dikembangkan oleh Van Wart et.al.[24]. EMAC adalah model yang berfokus pada karakteristik dan kemampuan pemimpin dalam melaksanakan peran aktifnya dalam proses adopsi teknologi untuk organisasi. Model ECAM dapat digambarkan sebagai berikut [25]:



Gambar 3. Model ECAM

Menurut Model ECAM di atas, terdapat delapan faktor anteseden yang berasal dari karakteristik dan kemampuan seorang pemimpin yang memengaruhi *e-leadership*, yaitu energi, kebutuhan untuk prestasi, *responsibilitas*, *fleksibilitas*, kemampuan analisis, pembelajaran berkelanjutan, dan kemampuan teknis. Pada aspek berperilaku, terdapat tiga faktor utama yang terdiri dari kesadaran aktif atas TIK, kualitas terhadap evaluasi TIK, dan kesediaan untuk berusaha lebih keras yang secara langsung memengaruhi intensi untuk menggunakan TIK.

Faktor intensi tersebut selanjutnya menjadi penentu tingkat adopsi TiK secara individual dari seorang pemimpin, yang merupakan gambaran dari *e-leadership* [25].

Selain perlu mempertimbangkan faktor-faktor anteseden dan berperilaku di atas, upaya untuk mengoptimalkan *e-leadership* juga harus mempertimbangkan kapabilitas dan lingkup pengambilan keputusan yang harus dimiliki oleh seorang *e-leader*. Berikut ini berbagai kapabilitas dan domain pengambilan keputusan tersebut [26]:

Tabel 3. Kapabilitas dan Domain Pengambilan Keputusan *E-Leadership*

Domain Pengambilan Keputusan	Keterangan	Kapabilitas <i>E-Leadership</i>
Penyelarasan pelaksanaan strategi	Merancang infrastruktur TI dan strategi organisasi	Perumus dan pelaksana strategi
Penyelarasan transformasi teknologi	Mengidentifikasi kompetensi TI terbaik serta menghubungkan sistem informasi organisasi dengan pelaksanaan strategi	Perancang visi dan arsitektur teknologi
Penyelarasan potensi unggul	Mengeksploitasi perkembangan TI untuk meningkatkan kualitas layanan	Visioner dan katalisator TI
Penyelarasan pada tingkat layanan	Memahami strategi TI dengan mempertimbangkan rancangan sistem informasi internal dan proses organisasi	Penentu prioritas dan pemimpin eksekutif

Optimalisasi *e-leadership* melalui beragam metode di atas diharapkan dapat mendukung pelaksanaan dan pencapaian berbagai tujuan dari *e-government* pada pemerintah daerah sebagaimana disebutkan dalam Inpres 3/2003, yaitu untuk membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik; membentuk hubungan interaktif dengan dunia usaha; membentuk mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga negara dan publik; dan membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien. Selanjutnya jika mengacu pada PP 95/2018, maka tujuan dari *e-government* yang dikemas dalam SPBE adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, maka sasaran SPBE antara lain adalah

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna
3. Terseleggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi
4. Meningkatkan kapasitas SDM SPBE

Berkaitan dengan situasi pandemi covid-19, maka salah satu tujuan *e-government* dan SPBE adalah untuk memberikan layanan publik yang dapat dibutuhkan masyarakat dalam proses perubahan menuju situasi *new normal*. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, maka *e-leadership* pada pemerintah daerah perlu diterapkan dengan mengacu pada konsep dasarnya, yaitu kepemimpinan yang mengedepankan pemanfaatan TI dalam komunikasi antara pemimpin dan pengikutnya, serta pada proses pengumpulan dan penyebaran informasi [15]. Informasi yang disebarluaskan utamanya berisi penjelasan mengenai konsep *new normal* serta himbauan kepada masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan selama masa transformasi menuju *new normal*.

Sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, masa *new normal* adalah tatanan hidup baru yang mengedepankan kepatuhan terhadap berbagai ketentuan dalam protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, menggunakan *hand sanitizer*, dan lain-lain. Masa *new normal* merupakan masa dimana masyarakat diasumsikan memiliki kepatuhan tinggi dalam melaksanakan berbagai ketentuan tersebut, sehingga penyebaran covid-19 dapat ditekan semaksimal mungkin [27]. Pada masa tersebut, pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melaksanakan berbagai aktivitas penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti bekerja di pasar atau perusahaan, belajar di sekolah, dan lain-lain, namun dengan catatan, yaitu tetap mematuhi protokol kesehatan [28].

Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan *e-government* pemerintah daerah perlu menjadikan penyebaran informasi terkait *new normal* kepada masyarakat sebagai prioritas utama. Upaya tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan TI yang dimiliki oleh Pemda, serta dengan mengoptimalkan peranan dari *e-leader* dengan pada berbagai domain pengambilan keputusan sesuai dengan kapabilitasnya. Selanjutnya jika mengacu pada model EMAC yang menyatakan bahwa *e-leadership* dapat dipengaruhi oleh aspek karakteristik dari pemimpin, maka pemilihan *e-leader* pada Pemda melalui pengembangan jabatan fungsional PNS harus menggunakan kriteria yang tepat agar diperoleh kandidat yang memiliki karakteristik sesuai kebutuhan untuk menjadi *e-leader*.

#### 4. KESIMPULAN

Pelaksanaan *e-government* oleh Pemda pada dasarnya telah diinisiasi sejak dikeluarkannya Inpres 3/2003. Namun demikian, seiring dengan dikeluarkannya PP 95/2018, maka penggunaan istilah *e-government* digantikan dengan istilah SPBE. Penggantian istilah tersebut ternyata menyebabkan perkembangan *e-government* menjadi terhambat. Hal ini didasarkan pada konsep SPBE yang tidak memiliki dimensi dan atribut yang jelas seperti Pemingkatan *E-Government* Indonesia (PeGI), yang dapat dijadikan acuan oleh Pemda dalam menerapkan *e-government*. Akibatnya, meskipun *e-government* telah diinisiasi sejak 17 tahun lalu, namun hingga tahun 2020 masih belum terdapat keterpaduan penerapannya antar lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Padahal, aspek keterpaduan adalah salah satu prinsip utama dalam pengembangan *e-government*. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penerapan *e-government* di Pemda masih belum dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Penerapan *e-government* merupakan salah satu pembentuk kinerja organisasi publik, atau dalam konteks penelitian ini adalah Pemda. Secara konseptual maupun telah dibuktikan secara empiris, kinerja organisasi dapat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan. Oleh karena itu, maka penerapan *e-government* juga dapat dipengaruhi oleh kepemimpinan pada organisasi publik, atau yang secara spesifik dipengaruhi oleh *e-leadership*. Penerapan *e-government* yang belum efektif dan efisien menggambarkan *e-leadership* di Pemda yang juga masih belum optimal. Adapun metode untuk mengoptimalkan *e-leadership* pada *e-government* Pemda terdiri dari: 1) Meningkatkan pengetahuan *e-leader* mengenai TI yang digunakan di Pemda; 2) Menciptakan budaya kerja yang kondusif terhadap penerapan *e-government*; 3) Melaksanakan promosi literasi SPBE; 4) Pengembangan jabatan fungsional PNS; 5) Pelaksanaan kemitraan dengan pihak non pemerintah untuk meningkatkan kompetensi teknis ASN terkait *e-government*; 6) Menggunakan pendekatan EMAC untuk memilih kandidat *e-leader*; dan 7) Meningkatkan kapabilitas *e-leadership* pada berbagai domain pengambilan keputusan.

Optimalisasi *e-leadership* pada *e-government* di Pemda tersebut diharapkan dapat menyukseskan transformasi menuju era *new normal* melalui penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai konsep *new normal* dan terkait pentingnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Covid19.go.id, “Peta Sebaran Covid-19,” 2021. <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19> (accessed Nov. 03, 2021).
- [2] Kominfo.jatimprov.go.id, “Kota Blitar Jawa Timur Jadi Tempat Pertama Uji Coba PPKM Level 1 Jawa – Bali,” 2021. <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kota-blitar-jawa-timur-jadi-tempat-pertama-uji-coba-ppkm-level-1-jawa-bali>.
- [3] D. Karno and L. Sulaiman, “Peran Pemerintah dan Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan Covid-19,” J. Ilm. permas, Vol. 11, No. 3, pp. 665–672, 2021.
- [4] D. Ginanjar, “Peran Pemerintah Daerah pada Penanganan Covid-19,” J. Polit. Pemerintah. Dharma Praja, Vol. 13, No. 1, pp. 52–68, 2020.
- [5] M. Huda and N. S. Yunas, “The Development of E-Goverment System in Indonesia,” J. Bina Praja, Vol. 8, No. 1, pp. 97–108, 2016.
- [6] M. M. Amyan, M. Al-saudi, and H. H. Al-Onizat, “The Effective Utilization of Knowledge Management in E-Government: A Case Study of E-Government in Jordan,” Eur. Sci. J., Vol. 12, No. 2, pp. 290–308, 2016.
- [7] E. S. Sintiya, T. D. Susanto, and A. C. Puspitaningrum, “Electronics-Leadership (E-Leadership) Dalam Sektor E-Government: Literature Review,” J. Nas. Teknol. dan Sist. Inf., Vol. 6, No. 3, pp. 158–168, 2020.
- [8] T. Savolainen, “Trust-Building in e-Leadership: A Case Study of Leaders’ Challenges and Skills in Technology-Mediated Interaction,” J. Glob. Bus. issues, Vol. 8, No. 2, pp. 45–56, 2014.
- [9] E. P. Anugrah, “Electronic Record Keeping to Support Indonesia EGovernment Implementation,” Rec. Libr. J., Vol. 6, No. 1, pp. 31–44, 2020.
- [10] I. G. Prihanto, “Studi Komparasi Pengembangan e-Government Negara-Negara Anggota Perserikatan Bangsa Bangsa Untuk Mendukung Pengembangan e-Government di Indonesia,” IPTEK-KOM, Vol. 15, No. 3, pp. 155–170, 2013.
- [11] Suhardi, A. Sofia, and A. Andriyanto, “Evaluating E-Government And Good Governance Correlation,” J.ICT Res. Appl., Vol. 9, No. 3, pp. 236–262, 2015.
- [12] E. H. Alkhajeh, “Impact of Leadership Styles On Organizational Performance,” J. Hum. Resour. Manag. Res., pp. 1–10, 2018.

- [13] M. Madanchian, N. Hussein, F. Noordin, and H. Taherdoost, "Effect of leadership on organizational performance," *Econ. Educ.*, pp. 115–119, 2016.
- [14] M. A. Kareem and Z. J. Haseeni, "E-government and Its Impact On Organizational Performance," *Int. J. Manag. Commer. Innov.*, Vol. 3, No. 1, pp. 664–672, 2015.
- [15] L. Alfahaid and E. E. Mohamed, "Understanding The Influence of E-Leadership On Virtual Team Performance Empirical Study," *Int. J. Bus. Appl. Soc. Sci.*, Vol. 5, No. 10, pp. 21–36, 2019.
- [16] B. J. Avolio, J. J. Sosik, S. S. Kahai, and B. Baker, "E-leadership: Re-Examining Transformations In Leadership Source And Transmission," *Leadersh. Q.*, Vol. 25, No. 1, pp. 104–131, 2014.
- [17] J. W. Creswell, *Research Design: Quantitative and Qualitative Approach*. London: Sage Publishing, 2014.
- [18] S. Siyoto and A. Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- [19] M. B. Miles and A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis. (terjemahan)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005.
- [20] Indonesia.go.id, "Ketika Indeks e-Government Indonesia Naik 19 Peringkat," 2020. <https://indonesia.go.id/kategori/kuliner/1946/ketika-indeks-e-government-indonesia-naik-19-peringkat> (accessed Nov. 09, 2021).
- [21] N. Zanda, "Penerapan SPBE Transformasi dari e-Government Menuju i-Government," *aptika.kominfo.go.id*, 2019. <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/penerapan-spbe-transformasi-dari-e-government-menuju-i-government/> (accessed Nov. 09, 2021).
- [22] D. B. Napitupulu, "Pengujian Kerangka Kerja Pemeringkatan E-Government di Indonesia (PeGI): Studi Kasus di Tingkat Kementerian," *J. Penelit. Komun.*, Vol. 20, No. 1, pp. 15–30, 2017.
- [23] *www.kominfo.go.id*, "Indeks SPBE 2020 Meningkat, Pemerintah Tidak Berpuas Diri," 2021. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/32478/indeks-spbe-2020-meningkat-pemerintah-tidak-berpuas-diri/0/berita> (accessed Nov. 09, 2021).
- [24] M. Van Wart, A. Roman, and S. Pierce, "Integrating ICT Adoption Issues Into (e-) Leadership Theory," *Telemat. Informatics*, Vol. 34, No. 5, pp. 527–537, 2016.
- [25] C. Liu et al., "E-leadership: An Empirical Study of Organizational Leaders' Virtual Communication Adoption," *Leadersh. Organ. Dev. J.*, 2018.
- [26] W. Li, K. Liu, M. Belitski, A. Ghobadian, and N. O'Regan, "e-Leadership Through Strategic Alignment: An Empirical Study of Small- and Mediumsized Enterprises In The Digital Age," *J. Inf. Technol.*, Vol. 31, pp. 85–206, 2016.

- 
- [27] W. Sugeng, P. Kukuh, P. Dhanny, Y. Elia, P. Ogis, and A. Rizqi, "Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19 di Era New Normal pada Kampung Tangguh Desa Karangdoro, Terminal Jajag, dan RTH Maron Genteng, Kabupaten Banyuwangi," *Multidiscip. J.*, Vol. 3, No. 1, pp. 25–33, 2020.
- [28] C. I. Atmajanti, G. C. Richtiara, K. Khairunnisa, D. Az-zahra, N. A. Sophia, and A. Rahmawati, "Edukasi Protokol Kesehatan New Normal dan Pengenalan Dunia Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Media Sosial," *J. Layanan Masy.*, Vol. 4, No. 2, pp. 472–478, 2020.



# 2022 - Analisis E-Leadership (JATISI)

---

## ORIGINALITY REPORT

---

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

5%

★ 123dok.com

Internet Source

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On

# 2022 - Analisis E-Leadership (JATISI)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

**/0**

GENERAL COMMENTS

**Instructor**

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15